



Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal¹

Sarekat Hijau Indonesia²

Pengantar

Sarekat Hijau Indonesia telah melakukan analisis terhadap pemilu 2009, khususnya pemilu legislatif berdasarkan kajian terhadap agenda hijau partai-partai politik, juga rekam jejak ekologi partai politik (baca: khususnya partai-partai yang pernah berkuasa) dalam hal membuat produk-produk kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat. Hasilnya, pemilu 2009 tidak lebih hanya menjadi jalan lanjutan bagi rente ekonomi dan kekuasaan politik modal.

Sarekat Hijau Indonesia masih memandang agenda lingkungan hidup dan rakyat lainnya belum menjadi sebuah gerakan ideologis bagi partai-partai politik, meskipun beberapa partai politik sudah mencantumkan kata-kata lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dalam dokumen visi-misi, platform atau program strategis partai. Indikator sederhana untuk mengukur ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dimana perundang-undangan tersebut justru semakin melanggengkan praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam dan mendorong semakin masifnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, yang melahirkan kemiskinan dan kekerasan negara yang semakin tinggi, serta menyebabkan rakyat kehilangan akses dan kontrolnya terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat.

Lalu bagaimana dengan pemilu presiden 2009 ini, sejauhmana agenda lingkungan hidup dan rakyat menjadi agenda utama yang ditawarkan? Sarekat Hijau Indonesia menggunakan empat nilai utama yakni demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk melihat sejauh mana relevansi antara pemilu presiden terhadap krisis ekologi dan krisis rakyat lainnya.

Bukan Sekedar Hijau

Sarekat Hijau Indonesia memandang bahwa secara substansi pemilu presiden 2009 masih belum beranjak maju untuk mencapai sebuah cita-cita besar bagi perwujudan demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ini dapat dicermati dari diabaikannya agenda “hijau” sebagai sebuah agenda utama dalam kebijakan partai-partai politik baik dalam visi misinya, platform maupun program partai. Agenda hijau tentu bukan hanya melihat lingkungan hidup sebagai sebuah wacana, melainkan juga sebagai sebuah ideologi yang menjadi arah gerak dari sebuah perubahan yang mendasar atas tatanan ekonomi Indonesia dan global yang kental bercorak kapitalistik.

Salah satu ukuran untuk menilai ini memang pada dokumen calon presiden bersama pasangannya, di dalam visi, misi, dan program kerja Capres-Cawapres, antara lain sebagai berikut:³

¹ Disampaikan oleh Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia

² Sarekat Hijau Indonesia (SHI) adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa pada tanggal 6 Juli 2007 dan dideklarasikan di Jakarta oleh aktivis dan perwakilan organisasi dari 21 provinsi di Indonesia dengan latar belakang profesi dan aktivitas, antara lain: aktivis organisasi non pemerintah, mahasiswa, seniman, kader-kader Sarekat Hijau Indonesia, akademisi dan pimpinan organisasi rakyat. Gerakan bersama ini merupakan embrio partai hijau di Indonesia, sebuah partai politik alternatif yang di dukung rakyat untuk mewujudkan cita-cita demokrasi kerakyatan, keadilan social, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

³ Sumber: www.kpu.go.id

No	Nama Capres/Cawapres	Visi Misi	Isu Lingkungan dan SDA
1	Megawati-Prabowo	<p>Visi: Gotong royong membangun kembali Indonesia yang berdaulat, bermartabat, adil dan makmur.</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat; • Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; • Menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif. 	<p><u>Program dibidang ekonomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri berbasis sumber daya alam terbarukan, khususnya industri pertanian dan perikanan, bukannya industri mercusuar ber kandungan impor tinggi yang dibiayai utang. Sumber daya pendukung seperti gas akan diprioritaskan untuk mendukung industri domestik. Mendahulukan untuk menggali sumber-sumber daya lokal daripada impor. • Mendorong berbagai riset serta program konservasi lingkungan dengan menempatkan masyarakat dan budaya setempat sebagai subjek. • Kedaulatan pangan dan energy dengan: Mendirikan kilang-kilang minyak pabrik bioethanol dan pabrik DME (pengganti LPG); Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioethanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta hektar hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt ethanol/tahun) <p>Program aksi dibidang kelestarian alam dan lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penghijauan kembali 59 juta hektar hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung. 2. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai. 3. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan. 4. Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.
2	Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono	<p>Visi: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera. • Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi. • Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. 	<p><u>Dalam bidang pangan</u>, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa; (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; (e) menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran; dan (f) meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan <i>comparative advantage</i> dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.</p> <p><u>Di bidang energi</u>, membangun ketahanan energi dengan mencapai; (a) diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda;</p> <p>(b) Meningkatkan penggunaan <i>renewable energy</i> dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; (c) Meningkatkan efisisensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan (d) Memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.</p>

No	Nama Capres/Cawapres	Visi Misi	Isu Lingkungan dan SDA
			<p>Di bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam di perkotaan dan pedesaan. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.</p> <p>Program di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai. 2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon- baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian. 3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3	Jusuf Kalla-Wiranto	<p>Visi: Indonesia yang adil, mandiri dan bermanfaat.</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. • Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat • Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinekaan. • Mewujudkan bangsa yang aman, tentram dan damai dengan penegakan hukum dan ham • Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik. 	<p>Isu lingkungan masuk dalam program di bidang ekonomi yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Membangun kedaulatan pangan dan energi</u>, pembangunan energi harus diorientasikan pada optimalisasi pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui (seperti panas bumi dan energi nabati) guna mencukupi kebutuhan energi nasional 2. <u>Reformasi agraria</u>. Reformasi agraria dimaksudkan agar ada jaminan ketersediaan lahan produktif pertanian, jaminan bahwa aset-aset lahan yang dimiliki petani Indonesia tidak mudah dialihfungsikan, dan garansi bahwa aset lahan petani dapat ditransformasikan menjadi modal dan kekuatan bagi pengembangan usaha pertanian. 3. <u>Lingkungan hidup dan perubahan iklim</u>. Membangun koherensi dan konsistensi pembuatan kebijakan dan peraturan yang menjamin keberlanjutan sumber daya alam selalu dilakukan dan akan terus ditingkatkan; peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari terus dilaksanakan dan akan selalu dipertahankan; Upaya konservasi serta rehabilitasi hutan masih perlu ditingkatkan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan teknologi, keterampilan, penegakan hukum, dan peninjauan kembali atas perizinan perusahaan hutan sehingga Indonesia tetap menjadi salah satu paru-paru dunia.

Jika melihat dari berbagai dokumen dan pernyataan sikap Capres-Cawapres, kita dapat melihat bahwa semua Capres memiliki agenda rakyat yang dijaminan berupa kesejahteraan, kemandirian dan keadilan. Yang menarik adalah ketika isu lingkungan hidup dan pengelolaan kekayaan alam dimasukkan dalam agenda ekonomi. Asumsinya, paradigma pasangan tersebut dalam melihat persoalan lingkungan hidup dan kekayaan

alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda ekonomi politik. Ketiga Capres-Cawapres secara normatif juga memaparkan akar persoalan yang dialami oleh rakyat, yakni ketimpangan penguasaan modal.

Persoalan lingkungan hidup tidak sesederhana yang dibayangkan, dan tidak hanya bicara soal *science* dan teknologi. Bicara soal lingkungan hidup artinya kita bicara tentang persoalan yang lebih mendasar tentang sosial politik dan ekonomi politik, dimana saat ini ada kondisi yang tidak adil atas nama pembangunan ekonomi global, yang menghasilkan perubahan lingkungan yang tidak adil, khususnya bagi negara-negara selatan (global South). Tawaran program yang ditawarkan, tidak menyentuh akar persoalan tersebut dan juga terlihat ada kontradiksi. Di satu sisi ada keinginan melakukan perbaikan kondisi hutan, namun di sisi lain tetap menawarkan program untuk pembukaan kawasan skala luas untuk satu komoditi (monokultur), yang jelas-jelas akan menghabiskan keanekaragaman hayati dan menghancurkan ekologi.

Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbandung. Bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Program pengelolaan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang ditawarkan tidak memperhitungkan tingkat kegentingan tersebut, dan belum dilihat sebagai bangunan yang saling terkait dalam melihat persoalan lingkungan hidup dalam perspektif global, khususnya pada pilihan sistem ekonomi politik yang dianut oleh ketiga kandidat yang mengklaim memiliki agenda perubahan bagi rakyat dan lingkungan hidup.

Agenda ekonomi kerakyatan yang selalu digembar-gemborkan tidak menyentuh persoalan ketidakadilan ekonomi global, sebagai sebuah akar persoalan krisis ekologi dan kemiskinan saat ini. Dan jika dilihat lebih tajam, Sarekat Hijau Indonesia dapat melihat bahwa semua propaganda Capres-Cawapres meski dibungkus dengan ekonomi kerakyatan masih menempatkan kekayaan alam sebagai pundi-pundi ekonomi. Ini menunjukkan paradigma Capres-Cawapres tidak berubah dari paradigma ekonomi kapitalisme yang selama ini telah dipraktekkan, yang memiliki kecenderungan eksploitatif dan sesungguhnya justru menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan hidup yang sudah semakin membuat jutaan rakyat semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya, dihilangkan hak-haknya dasarnya. Inilah yang dinilai tidak berubah dari paradigma ekonomi selama ini dan kecenderungannya tetap eksploitatif. Secara sederhana Sarekat Hijau Indonesia dapat menilai bahwa watak ketiga Capres-Cawapres tidak berubah didalam melihat kekayaan alam dan lingkungan hidup, yakni berwatak kapitalistik. Program kerja yang ditawarkan oleh para Capres-Cawapres juga tidak menempatkan kearifan komunitas lokal/adat sebagai sistem yang akan diterapkan dalam sistem pengelolaan kekayaan alam. Padahal sistem kelola kekayaan alam oleh komunitas lokal/adat telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologis dan memperkuat kedaulatan pangan dan energi.

Sarekat Hijau Indonesia menilai bahwa agenda lingkungan hidup yang ditawarkan dan atau disampaikan oleh Capres-Cawapres masih menempatkan lingkungan hidup sebagai isu parsial, bukan sebagai sebuah roh gagasan atas perubahan yang ditawarkan. Persoalan lingkungan hidup belum dilihat dalam sebuah bingkai bangunan struktural (relasi kelas dan gender) dan sistemik di tingkat global yang berdampak pada kemiskinan dan kehancuran ekologi di tingkat lokal dan menempatkan seluruh ongkosnya kepada rakyat miskin.

Sarekat Hijau Indonesia juga belum menemukan sebuah kemauan politik atas pemulihan krisis ekologi, yang dilihat dalam konteks mewujudkan keadilan ekologi sebagai sebuah cita-cita politik yang dijamin dan dilindungi penegakannya oleh konstitusi. Terlebih sampai saat ini lingkungan hidup belum dinilai sebagai salah satu alat produksi, yang bisa menjamin keselamatan, produktifitas dan kesejahteraan rakyat. Karena itulah, kecenderungannya krisis ekologi selalu naik seiring dengan angka kemiskinan.

Bicara soal buruh migran, misalnya, seharusnya tidak hanya berhenti pada bagaimana negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap buruh migran, khususnya buruh migran perempuan (TKW) yang rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, melainkan juga menyikapi akar persoalan terjadinya buruh migran yaitu semakin hilangnya sumber-sumber produksi rakyat. Indikator ini dapat kita lihat dari daerah asal para buruh migran yaitu daerah kantong-kantong kemiskinan yang sebenarnya memiliki kekayaan alam. Sayangnya, daerah-daerah tersebut dikuasai oleh para pemilik modal, yang justru mendukung biaya politik ketiga capres dan cawapres.

Rekam Jejak Ekologi

Sarekat Hijau Indonesia tidak hanya melihat dokumen ketiga pasangan pemimpin bangsa ini ke depan, karena yang tidak kalah penting untuk dinilai adalah bagaimana selama ini sepak tepak terjang semua kandidat dalam menyikapi berbagai persoalan rakyat dan lingkungan hidup. Penilaian ini menjadi penting, karena inilah yang

dapat membantu kita untuk mengukur sejauhmana dokumen tersebut dapat dijadikan acuan kerja mereka ketika memimpin. Selain itu, karena kecenderungan bangsa ini cepat melupakan berbagai peristiwa yang menghancurkan lingkungan hidup dan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Sekedar mengingatkan bahwa dalam kajian Sarekat Hijau Indonesia terhadap partai politik mengatakan bahwa keadilan ekologi belum menjadi ideologi partai politik yang dipimpin oleh ketiga pasangan tersebut.

Sarekat Hijau Indonesia menilai kasus Lumpur Lapindo menjadi salah satu indikator tersebut. Ribuan warga korban lumpur Lapindo, sudah tiga tahun tidak mengalami titik terang pemulihan hak-hak mereka. Rangkaian kemiskinan menjadi sebuah keniscayaan di daerah Sidoarjo, akibat praktek eksploitatif terhadap kekayaan alam ini. Tabel di bawah ini mengungkap pernyataan dan sikap Capres serta apa kesalahan besar ketiga Capres dalam kasus tersebut⁴:

No	Nama Capres	Pernyataan di media massa dan Debat Capres	Kontribusi Kesalahan
1	Megawati	Kasus Lapindo sebagai bencana nasional.	UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri saat menjadi Presiden Republik Indonesia, membuat kontrol pemerintah terhadap industri migas, termasuk Lapindo, menjadi lemah.
2	Susilo Bambang Yudhoyono	Kasus Lapindo sebagai bencana alam.	SBY bersama JK selama tiga tahun telah membiarkan atau mengabaikan hak-hak dasar warga yang terkena lumpur Lapindo, bahkan mengkotakkan warga krisis dengan mengeluarkan Perpres luasan dampak yang tidak mengcover warga lainnya yang saat ini terkena dampak dan terancam terkena dampak. Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007 dan Perpres No 48 tahun 2008. Perpres tersebut secara legal telah mengabaikan persoalan dampak kesehatan, lingkungan hidup dan sosial lainnya.
3	Jusuf Kalla	Lapindo melanggar HAM, Pemerintah akan lebih kuat dari pada Lapindo.	JK bersama SBY selama tiga tahun telah mengabaikan hak-hak dasar warga Lapindo yang sampai saat ini tidak dipenuhi oleh PT. Lapindo Brantas.

Selain dilihat kasus per kasus, ketiga Capres ini juga melahirkan paket kebijakan *kreatif-destruktif* yang merusak dan menghancurkan lingkungan hidup, baik melalui partai politiknya yang ada di parlemen maupun selama masa kepemimpinannya. Paket kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:⁵

No	Produk Kebijakan	Keterangan
1	Perpu 1/2004 yang kemudian menjadi UU No. 19/2004 yang mengizinkan 13 perusahaan melakukan penambangan terbuka di hutan lindung	Dimasa pemerintahan Megawati
2	Melepas LNG Tangguh dan privatisasi BUMN sektor-sektor strategis	Dimasa pemerintahan Megawati
3	UU 18/2004 tentang Perkebunan	Dimasa pemerintahan Megawati
3	UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air	Dimasa pemerintahan Megawati
4	UU 27/2007 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dimasa pemerintahan SBY – JK
5	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	Dimasa pemerintahan SBY – JK
6	UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang	Dimasa pemerintahan SBY – JK
7	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Dimasa pemerintahan SBY – JK

Salah satu kunci untuk mewujudkan keadilan ekologi adalah alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Selain kita bisa menilai dari dokumen dan produk-produk kebijakan yang dikeluarkan, kita juga dapat menilai dari rekaman jejak ekologi Capres-Cawapres seberapa besar akumulasi sumber daya (modal) yang dikuasai khususnya dalam industri ekstraktif dan bisnis infrastruktur yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu masalah pokok krisis lingkungan hidup adalah ketika terjadi akumulasi sumber daya dan akumulasi keuntungan oleh segelintir elit dan lingkungan hidup diabaikan. Penguasaan sumber daya tersebut bukan hanya dimiliki oleh ketiga Capres-Cawapres tersebut, tetapi juga keluarga dan kroni yang menyokong pelanggaran kekuasaan politik dan modal.

Ketiga Capres-Cawapres merupakan elit politik yang ditengarai mendapatkan biaya dari industri ekstraktif dari hasil pembalakan liar, konsesi hutan, konversi hutan menjadi perkebunan besar kelapa sawit, dan perkebunan kayu monokultur untuk industri pulp dan kertas, yang selama ini telah melakukan kejahatan lingkungan hidup

⁴ Diolah dari berbagai sumber

⁵ Diambil dari berbagai sumber

dan kemanusiaan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua, serta bisnis di bidang pembangunan infrastruktur baik melalui perusahaan yang dimiliki sendiri maupun dikelola oleh keluarga atau kroninya.⁶ Selain itu, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus *destructive logging* yang dilakukan oleh 13 industri kehutanan di Riau di akhir tahun 2008, diindikasikan merupakan hasil dari konsesi-konsesi politik dari Capres dan Partai Politik dengan perusahaan tersebut.

Apa yang terjadi dalam konteks Indonesia saat inipun, keadilan ekologi harus dibumikan dan bukan sebatas jargon yang hanya disimbolkan dengan tanam pohon, tanpa mau bicara soal bagaimana bangunan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan konsumsinya. Kondisi dimana tingkat kegentingan ekologi yang ditandai dengan bencana ekologis menjelaskan bahwa pilihan ekonomi politik inilah yang justru mendorong kehancuran lingkungan hidup yang menjadi bagian dari ongkos politik yang parahnya justru ditimpakan kepada rakyatnya.

Wacana ekonomi kerakyatan menjadi menu utama yang disajikan oleh Capres-Cawapres. Setiap hari kita disuguhi dengan berbagai iklan politik pencitraan sebagai pendukungnya. Namun, sementara ini dari praktek-praktek yang dilakukan oleh ketiganya, dalam penilaian Koalisi Anti Utang bahwa semua yang bicara anti neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan saat ini ada yang palsu, ada yang tidak mengerti dan ada yang setengah hati.

Sarekat Hijau Indonesia memahami bahwa ekonomi kerakyatan adalah sebuah modal awal untuk bisa menilai sejauh mana demokrasi bisa berjalan di suatu negara, seperti yang disampaikan oleh pendiri bangsa bahwa tidak ada demokrasi tanpa adanya ekonomi kerakyatan. Dari sini jelas, bahwa demokrasi politik yang diterjemahkan dalam kotak suara pemilu tidak membawa manfaat bagi rakyat, jika tidak diikuti dengan ekonomi kerakyatan, yakni dengan menyerahkan alat-alat produksi ke tangan rakyat sebagaimana yang dimandatkan dalam konstitusi negara.

Bung Hatta tidak berhenti bicara ekonomi kerakyatan sampai di situ, karena cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia (*Hatta, 1960*). Apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa ini, semakin memperteguh keyakinan Sarekat Hijau Indonesia bahwa dalam hal ini lingkungan hidup adalah salah satu alat produksi tersebut.

Demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kerakyatan hanya menjadi jargon jika tidak ada jaminan terhadap keadilan ekologis yang bisa memastikan kualitas hidup manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiannya. Bagaimana mungkin membicarakan bahwa Capres-Cawapres memiliki agenda lingkungan hidup dan untuk kesejahteraan rakyat, jika pembiayaannya tetap menggunakan mekanisme yang dibangun dengan pendekatan sistem kapitalisme seperti mekanisme perdagangan karbon dan *debt swap for nature*. Padahal seluruh biaya pemulihan lingkungan hidup dan adaptasi-mitigasi perubahan iklim bisa dilakukan dengan menggunakan mekanisme tuntutan atas utang ekologis terhadap negara-negara industri, yang telah mengekstraksi kekayaan alam Indonesia, yang juga telah menghancurkan lingkungan hidup dan menyisakan berbagai cerita kemiskinan.

Hingga saat ini, praktek-praktek menyelamatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup, serta keselamatan rakyat di seluruh pelosok nusantara, telah dilakukan oleh beragam komunitas lokal/adat di Indonesia. Misalnya pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, penggunaan sumber air bersih pedesaan, penanaman jenis-jenis varietas lokal tanaman, melindungi hutan-hutan adat, menentang perluasan perkebunan kelapa sawit yang merusak oleh masyarakat, mengkritik dan menentang penggalian tambang skala besar, dan melakukan penyimpanan bahan makanan di lumbung-lumbung desa, mengelola listrik tenaga air skala kecil, membangun jaringan ekonomi antar desa, dan menciptakan "bank" desa berbentuk kebun dan hutan.

Keadilan ekologi juga hanya akan menjadi wacana kampanye pemilu presiden 2009, jika tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya, sebagai sebuah upaya kolektif sebuah negara yang berdaulat. Yang utama adalah bagaimana melakukan perubahan mendasar atas tatanan ekonomi politik Indonesia yang menganut paham kapitalistik. Salah satunya dapat dibuktikan dengan dilakukannya penghapusan utang luar negeri, karena sebagian besar utang luar negeri Indonesia yang disponsori lembaga keuangan internasional diperuntukkan bagi investasi dalam pengelolaan kekayaan alam yang memiliki daya rusak tinggi, antara lain di sektor tambang, perkebunan besar, pembangunan infrastruktur, serta pesisir dan laut.

⁶ George Junus Aditjondro, Jejak Rekam Para Capres di Bidang Lingkungan dan Pilihan Bagi Gerakan Lingkungan Di Indonesia

Alur kapital telah secara terus menerus menjadikan rakyat dan lingkungan hidup sebagai korban pembangunan, melalui utang luar negeri yang dikucurkan, pembangunan infrastruktur dan investasi, yang kesemua alur ini melanggar hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Begitu banyak fakta krisis yang dialami oleh bangsa ini, baik krisis ekonomi, krisis ekologis, krisis sosial dan krisis politik, sudah hampir dapat dipastikan akan selalu menempatkan kelas yang paling lemah sebagai korban dari sebuah sistem yang memiliki kekuatan, baik secara ekonomi maupun politik.

Penutup

Dari hasil analisis terhadap dokumen visi-misi dan program Capres-Cawapres, serta sejumlah produk perundang-undangan yang dikeluarkan, Sarekat Hijau Indonesia melihat semakin kuatnya Pemilu 2009 sebagai media transaksi politik, dibandingkan dengan proses pendidikan politik itu sendiri.

Sarekat Hijau Indonesia menilai tidak ada pasangan Capres-Cawapres yang berani menawarkan agenda perubahan mendasar, dengan merombak tata kuasa yang diturunkan pada sebuah nilai demokrasi kerakyatan, tata kelola untuk menjamin kedaulatan, tata produksi dan tata konsumsi yang dapat memastikan terwujudnya keberlanjutan lingkungan hidup.

Melihat realitas politik ini, Sarekat Hijau Indonesia meyakini bahwa tidak mungkin gerakan mewujudkan keadilan ekologi, yang dapat menjamin cita-cita ekonomi kerakyatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan cita-cita demokrasi kerakyatan, dipimpin oleh elit perusak lingkungan hidup. Harapan terbesar untuk menggerakkan agenda keadilan ekologi ini justru pada gerakan masyarakat sipil, khususnya gerakan lingkungan hidup di Indonesia yang berbasis gerakan kesadaran politik hijau. ##